

INTEGRASI CIVIC ENGAGEMENT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Siti Hamida Nopitasari^{1*}, Sutrisno², Sulton³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*Email:hamidasiti512@gmail.com

Received : 2023-12-19
Approved : 2024-01-30
Published : 2024-03-21

Abstrak

Penelitian dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana integritas dari civic engagement dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dengan akan keterlibatan warga dalam kegiatan apapun terutama pada kegiatan perekonomian warga. Objek penelitian ini adalah BUMDes di Desa Bringinan dengan metode penelitian kualitatif studi kausu dari penelitian ini hal yang didapatkan bahwasannya dalam rangka meningkatkan perekonomian warga berdirilah sebuah BUMDes yang memerlukan sebuah keterlibatan warga masyarakatnya untuk ikut menyukseskan perannya sebagai roda perekonomian warga masyarakat. Adanya integritas merupakan sebuah satu kesatuan yang sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan, guna untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat terutama pada aspek ekonomi.

Keywords: Pemberdayaan, Keterlibatan Warga, BUMDes

Abstract

The research was conducted in order to find out how the integrity of civic engagement is in Village Owned Enterprises (BUMDes). Where in social life can not be separated from the involvement of citizens in any activity, especially in the economic activities of citizens. The object of this research is BUMDes in Bringinan Village with a causal study qualitative research method. From this research, it was found that in order to improve the people's economy, a BUMDes was established which required the involvement of its community members to participate in the success of its role as a wheel of the economy of the community members. The existence of integrity is a unit that is very attached and cannot be separated, in order to achieve the goal of increasing the welfare of the community, especially in the economic aspect. members.

Keywords: Empowerment, Citizen Involvement, BUMDes

^{1,2,3} SI PPKN, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

PENDAHULUAN

Civic Engagment atau keterlibatan warga masyarakat saat ini menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Esensi dari keterlibatan sendiri merujuk pada kehidupan berpolitik, sosial serta ekonomi. Arti keterlibatan sangatlah melekat pada diri masyarakat yang secara spontan muncul tanpa adanya suatu dorongan atau paksaan dari orang lain. Namu, pada kenyataannya dalam proses keterlibatan warga masyarakat juga membutuhkan peran seorang penguat. Dalam artian ada power untuk menggerakkan

keterlibatan seluruh warga masyarakatnya (Wadu et al., 2020).

Civic Engagment disini dibagi menjadi empat bentuk diantaranya adalah keterlibatan politik, sosoal, moral dan sipil, yang masing-masing dapat dijabarkan secara luas dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Ruang lingkup dari keterlibatan warga masyarakat dalam *community civics* sendiri tidak lepas dari beberapa factor, salah satu factor yang paling berpengaruh adalah arus globalisasi yang mampu mempengaruhi pola piker setiap warga masyarakat (Nasirin & Isnarmi, 2019).

Pada pola interaksi pemerintah, pada dasarnya keterlibatan warga masyarakat sangat diperlukan sebagai pengontrol dari kinerja system pemerintah. Namun ditengah fungsinya yang sangat penting, masih sering dijumpai warga masyarakat yang masih cenderung apatis dan kurang adanya minat, kesadaran dalam memiliki sebuah system pemerintah. Maka dari pada itu penguatan *civic engagement* dalam skala kecil maupun besar harus dilakukan di dalam skala kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam lingkup pemerintahan terkecil yaitu pemerintah Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa menjadikan integritas dari penguatan *civic engagement* semakin mudah. Masyarakat akan mudah terarahkan dimana titik keterlibatan yang akan di fokuskan sebagai penunjang kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kepala desa tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh koordinasi dan kerjasama dari Pemerintahan Desa itu sendiri (Chintary & Lestari, 2016). Seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan secara langsung ataupun tidak langsung guna menyukseskan dari program pemerintah Desa

Di era saat ini persoalan yang sering dihadapakan dengan warga masyarakat adalah masalah sosial dengan pembahasan pokok di Bidang Ekonomi (Susetiawan et al., 2018). Setiap tahunnya permasalahan ekonomi tidak lepas dari permasalahan pemerintah baik skala kecil hingga skala besar dan bahkan skala nasional maupun internasional. Untuk itu maka dilakukan pemberdayaan berupa Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes. BUMDes menjadi elemen dan instrumen penggerak perekonomian masyarakat Desa.

Pengelolaan BUMDes yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi, kebutuhan dan kapasitas desa akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata. Namun ditengah pentingnya pengelolaan BUMDes masih banyak ditemukan berbagai problema di dalamnya, salah satu problema utamanya adalah kurangnya

keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembentukan, hingga pengelolaan BUMDes. Untuk itu sebagai upaya peningkatan kapasitas dan integritas BUMDes membutuhkan suatu peran penting dalam meningkatkan kesadaran atas keterlibatan warga masyarakat.

- Civic Engagment

Civic engagement merupakan sebuah konsep pokok dalam community civics untuk dapat melakukan partisipasi dalam kehidupan public. Civic engagement juga di definisikan sebagai “individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern”. Yaitu sebuah tindakan individu maupun kolektif yang memang dirancang untuk mengidentifikasi dan untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul di public. Menurut Berger (2009) ada 4 bentuk keterlibatan yaitu keterlibatan politik, keterlibatan sosial, keterlibatan moral dan keterlibatan sipil. Untuk menjelaskan bentuk keterlibatan warga dalam penguatan civic engagement dalam pengelolaan BUMDes Bringinan menggunakan konsep keterlibatan warga negara yang ditawarkan oleh dengan 4 bentuk keterlibatan tersebut

- Keterlibatan Politik

Keterlibatan politik merupakan proses keikutsertaan warga negara dalam segala tahapan hingga pengambilan sebuah keputusan, keterlibatan ini mengacu pada seluruh kegiatan yang membutuhkan perhatian secara penuh dan secara langsung yang melibatkan seluruh komponen dalam pemerintahan yang dimaksud untuk atau memiliki konsekuensi mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian keterlibatan politik mencakup sebagian besar aktivitas yang dikaitkan dengan partisipasi politik seperti pemungutan suara, musyawarah mufakat, keterlibatan pengambilan keputusan, memberikan bantuan finansial kepada perwakilan kelompok, rapat terbuka

ataupun demonstrasi yang digunakan untuk mempengaruhi hasil politik.

- Keterlibatan Sosial

Keterlibatan sosial mencakup segala macam keterlibatan asosiasi. Asosiasi di sini berupa seluruh kegiatan yang melibatkan sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dengan sebuah interaksi yang memadukan sebuah gagasan, sikap, kegiatan yang melibatkan warga tersebut dalam kaitan memberikan sebuah dukungan dalam pelaksanaan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama dengan menjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong.

- Keterlibatan Sipil

Keterlibatan sipil merupakan penggambaran bagaimana individu tersebut terlibat dalam sebuah komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi sebuah hal yang positif. Keberhasilan kegiatan keterlibatan sipil tergantung pada kecenderungan orang untuk mengaggap dirinya sebagai integral dari masyarakat dan karena itu melihat masalah yang dihadapi masyarakat setidaknya bagian dari mereka sendiri. Di dalam keterlibatan sipil ini orang-orang tersebut akan menggali dampak moral dan sipil dari masalah yang dihadapi pada sebuah komunitas.

- BUMDes

Badan Usaha Milik Desa Regulasi Badan Usaha Milik yang biasa disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal keseluruhannya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan dari BUMdes untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi Desa melalui kewirausahaan desa, dimana yang dimaksud dengan kewirausahaan desa berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Modal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam pengelolaan merupakan sebuah pengendalian dan pemanfaatan semua factor sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu. Menurut Samson (2004) dikenal dengan istilah POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*).

- Pemberdayaan masyarakat

Pada kehidupan bermasyarakat tentunya juga terdapat berbagai problema, mulai dari ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan adanya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga akan memberikan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan secara social (Theresia, 2014). Dalam upaya untuk memberdayakan pada kelompok yang lemah dan rentang terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keterbelakangan. Dengan demikian keinginan mereka untuk maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Untuk itu upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan menurut sebagai berikut:

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sasaran warga masyarakat sesuai dengan kondisinya, yang memang bertujuan untuk membantu pengembangan manusiawi secara autentik dan integral dari kelompok masyarakat lemah, rentan, miskin, masyarakat adat yang terbelakang, pengangguran, kelompok disabilitas dan masyarakat yang di diskriminasikana. Dari beberapa kelompok tersebut kemudian akan diberdayakan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki guna dapat meningkatkan kualitas hidup terutama pada segi perkonomiannya.

- **Pemberdayaan Kelompok-Kelompok Masyarakat**

Pemberdayaan kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan berupa pendekatan kepada kelompok atau organisasi yang ada pada warga masyarakat secara sosial ekonomis, dengan tujuan dapat meningkatkan sebuah kemandirian dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun juga ikut berperan dalam pengembangan masyarakat.

Dari kedua upaya tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam pemberdayaan masyarakat terdapat dua upaya yang harus dilakukan yaitu dengan melalui sumberdaya manusia dan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada wilayah tersebut guna tercapainya sebuah pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif Selain itu juga terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk meningkatkan pemberdayaan, yang akan dilakukan agar sesuai dengan sasaran yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode Study Kasus. Pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen karena penelitiannya yang sarat oleh muatan *naturalistik*, seperti dikemukakan bahwa "*Naturalistic inquiry*

is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in meaning". Instrumen penelitian ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya itu (Creswell, 2013)

PEMBAHASAN

Pada dasarnya dalam lingkup masyarakat terdapat berbagai persoalan-persoalan sosial hingga ekonomi, dalam hal ini kebutuhan manusia akan dapat tercukupi jika seseorang tersebut melakukan pemenuhan seperti bekerja dan lain sebagainya. Saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga akan memberikan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan secara social (Theresia, 2014).

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 butir 12 juga di sebutkan bahwa "pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan warga masyarakat "(Republik Indonesia, 2014)

Pemberdayaan sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia melalui pendidikan, pemeliharaan ekonomi, pemeliharaan kesehatan dengan perencanaan yang cukup memadai bagi masyarakat. Yang pada intinya berusaha untuk membangkitkan potensi yang ada

dimiliki individu atau kelompok dengan memberikan kesadaran bagi warga masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat tersebut (Susetiawan et al., 2018).

Saat ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat Desa yaitu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa atau lebih bsering disebut dengan BUMDes. BUMDes ini dikembangkan oleh pemerintah Desa yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan wargamasyarakatnya. Arti dari kesejahteraan warga masyarakat disini yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa aman, tentram yang dapat menimbulkan pemenuhan hak dan kewajiban seseorang. Sehingga dari aspek sosiologis akan terjamin pemenuhannya secara utuh dan tidak terpisah-pisah.

Disinilah peran BUMDes sebenarnya, yang mana memiliki fungsi sebagai roda perekonomian warga masyarakat dengan segala sumber daya yang ada. Dari pengelolaan sumber yang ada tersebut maka terkelolalah potensi-potensi yang ada baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya (Dr. Sulton M.Si, 2011). Adanya BUMDes akan mempercepat laju peningkatan ekonomi masyarakat Desa, apalagi ditunjang dengan tata pengelolaan yang baik mulai dari perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terarah, penggerakan yang optimal dan ditunjang dengan pengawasan maka disinilah BUMDes dapat dikatakan berhasil.

Pada proses tersebut tentunya juga memerlukan keterlibatan dari berbagai komponen maka, timbullah yang namanya *civic engagement* yaitu sebuah keterlibatan warga masyarakat atau warga negara secara utuh dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. (Doolittle & Faul, 2013) mendefinisikan bahwa "*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*" yaitu sebuah tindakan secara individu atau kelompok yang di rancang untuk mengidentifikasi

dan mencari solusi atas segera permasalahan yang timbul. Di dalam sebuah keterlibatan ini terdapat 4 komponen yang tidak bisa dihilangkan yaitu keterlibatan politik, keterlibatan sosial, keterlibatan moral dan keterlibatan individu (Berger, 2009).

Dari keterlibatan tersebut maka muncullah suatu keterkaitan antara integritas *civic engagement* dalam BUMDes. Pada hakekatnya BUMDes tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak, antara pemangku kepentingan dengan warga masyarakat. Masing-masing komponen saling berkaitan, melebur menjadi satu membentuk sebuah kesatuan. Arti kata integritas sendiri adalah sebuah proses tentang penyatuan dari berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek politik, ekonomi, budaya hingga sosial. Yang mana seluruh aspek ini sudah ada dalam *civic engagement* atau keterlibatan warga masyarakat.

Pada integritas *civic engagement* dalam BUMDes sudah terlibat dari proses pembentukan BUMDes itu sendiri, karena terdapat aspek keterlibatan politik yaitu sebuah keterlibatan yang berguna untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang sudah ada maupun yang masih ingin direncanakan, yang mana warga masyarakat akan dilibatkan dalam proses musyawarah, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Tentunya guna mencari titik temu bagaimana langkah kedepannya untuk menata dan mengelola BUMDes dengan sesuai visi misi yang ada.

Setelah keterlibatan politik yaitu keterlibatan sosial, bagaimana kesadaran warga masyarakat akan adanya empati untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, keterlibatan sosial disini mulai dari timbulnya interaksi yang memadukan sebuah gagasan, sikap, kegiatan yang melibatkan warga dalam kaitan memberikan sebuah dukungan dalam pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pengelolaa BUMDes

Keterlibatan Moral merupakan suatu keterlibatan seseorang untuk menyumbangkan ide, gagasan, pikiran, dukungan masyarakat, sikap masyarakat dalam menerima bagaimana proses perencanaan, peengorganisasian pelaksanaan hingga pengawasan pada BUMDes, namun tidak hanya 3 keterlibatan ini yang dapat terintegrasi ada yang lebih penting yaitu keterlibatan sipil, juga bisa dikatakan keterlibatan individu. Keterlibatan sipil ini merupakan rasa keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk ikut terlibat secara langsung tanpa adanya suatu paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dari keterlibatan inilah makan akan mampu mengatasi berbagai problema-problema yang ada.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah langkah awal untuk mengatasi problema yang ada pada kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan membangun dan mendirikan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang akan dikelola dengan melibatkan seluruh elemen warga masyarakat. Adanya BUMDes diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa terutama pada ekonomi menengah kebawah.

Dalam tata pengelolaan keterlibatan warga masyarakat atau *civic engagement* menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dimana di dalam segala aktivitas BUMDes membutuhkan keterlibatan warga masyarakat, tanpa adanya keterlibatan makan akan menghambat kinerja BUMDES itu sendiri. Tak hanya itu integritas dari civic engagement dalam BUMDes juga sangat terlihat dan tidak bisa dipisahkan antar elemennya.

REFERENSI

Berger, B. (2009). Political theory, Political science and the end of civic engagement. *Perspectives on Politics*, 7(2), 335–350.

- <https://doi.org/10.1017/S153759270909080X>
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 59. www.publikasi.unitri.ac.id
- Creswell, J. W. (2013). *-Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approa* John W. Creswellches-SAGE Publications (2013).pdf (p. 273).
- Doolittle, A., & Faul, A. C. (2013). Civic engagement scale: A validation study. *SAGE Open*, 3(3), 1–7. <https://doi.org/10.1177/2158244013495542>
- Dr. Sulton M.Si. (2011). **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**. In *Jurnal Ilmiah CIVIS: Vol. 1* (Issue 2). Indonesia, R. (2014). *UU Desa No.6 Tahun 2014*.
- Nasirin, A., & Isnarmi, I. (2019). Penguatan Civic engagement di Lembaga Pelayanan Sosial. *Journal of Civic Education*, 1(4), 325–332. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.347>
- Samson, D. M. (2004). Principles of management. *Multiple Myeloma and Related Disorders*, 203–219. <https://doi.org/10.7748/en.13.1.6.s9>
- Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Bandut, S. (2020). Berbicara mengenai pembangunan, di era modern, saat ini pembangunan berkembang dengan sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial maupun berbagai aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 24.